

Claus Leggewie / Christoph Bieber

Demokrasi Interaktif

Komunikasi politik melalui online dan proses-proses politik digital

I. Pendahuluan

Awalnya, “politik di internet” hanyalah angan-angan tak jelas, tetapi dalam jangka waktu setengah dasawarsa angan-angan itu telah berkembang menjadi peristiwa rutin yang hampir tak dapat diabaikan pelaku politik dan masyarakat sipil. Semua dimensi politik terangkum dalam internet, yakni:

- politik (sebagai *policy*) dibuat untuk jaringan komunikasi ini yang sayangnya tidak dapat diatur dan diawasi seperti yang diharapkan (atau yang dikhawatirkan);
- politik (sebagai *politics*) juga terjadi di internet, ini berarti persaingan untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh semakin meningkat dengan adanya jaringan komunikasi ini;
- terakhir adalah masalah *netzpolitik* (sebagai polity) tentang pengaruh perubahan media terhadap konstitusi dan keterbentukan negara-negara demokrasi modern tentang arsitektur internet itu sendiri yang sama sekali “bukan ruang yang bebas dari kekuasaan” seperti yang dijanjikan.¹

Perubahan media ini dikaitkan dengan harapan-harapan, terutama sekali harapan akan pembaharuan “demokrasi langsung ala Athena” (Al Gore). Namun, adanya perubahan ini juga menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan, yakni munculnya “populisme elektronik” yang membahayakan demokrasi liberal. Akan tetapi, berdasarkan pengalaman yang telah dilewati sampai saat ini kedua masalah ini tidak perlu dipersoalkan. Sebaliknya, dalam melakukan komunikasi politik yang selama ini penelitiannya tidak pernah melibatkan media baru (internet) secara sistematis,² kita seharusnya melepaskan posisi-posisi yang terlalu ditentukan faktor teknik

¹ Bandingkan Claus Leggewie/Christa Maar (Pen.), *Internet dan Politik: Perubahan dari Demokrasi Penonton menjadi Demokrasi Partisipasi*, Mannheim 1998.

² Bandingkan dengan buku pedoman yang baru-baru ini terbit oleh Otfried Jarren/Ulrich Sarcinelli/Ulrich Saxer (Pen.), *Komunikasi Politik dalam Masyarakat Demokrasi. Buku Pedoman*, Opladen – Wiesbaden 1998. Perhatikan juga pembahasan tentang tema ini pada pusat media dan interaktifitas di Gießen (Zentrum für Medien und Interaktivität)

(technikdeterminisch) dan yang tidak memihak teknik (teknikindifferent). Itu berarti harus ada perubahan dalam mengembangkan politik. Media bukanlah satu-satunya faktor, sementara gaya lama, "politics as usual", tidak lagi sesuai dengan jaman.

Kekecewaan disebabkan hasil perdagangan elektronik dan harapan-harapan "New Economy" yang hancur berantakan juga mendukung proses pengembangan komunikasi politik melalui online (internet) yang selama ini kurang diperhatikan di dunia cyber. Terlepas dari semua propaganda dan kritik budaya yang selalu dihubungkan dengan inovasi teknik, terbukti bahwa perubahan radikal kehidupan sosial yang dipicu oleh komunikasi online ini juga menjamah kehidupan politik. Ini berarti komunikasi, praktek, dan konsultasi politik dihadapkan pada tantangan-tantangan baru dan penelitian bidang politik juga memperoleh tugas-tugas baru.

Di Jerman, perhatian orang dan pendanaan terutama sekali terkonsentrasi pada aspek "E – Government" yang intinya berarti "politik yang dekat dengan rakyat" dan menekankan pada rasionalisasi administrasi dengan pelayanan yang ramah. Jadi, inti dari "E – Government" itu adalah peningkatan efisiensi dan akseptasi sistem politik administratif. Bagi negara demokrasi yang harus mengatasi meningkatnya derajat kompleksitas tugas-tugas yang diberikan kepada pemerintah dan pasar dan yang harus kehilangan pengawasan terhadap aparat negara dalam arena global, aspek ini sangatlah penting. Media interaktif pada keyataannya dapat membuat konsep-konsep politik menjadi konkrit. Konsep-konsep yang kurang menuntut pengendalian secara hirarki karena ia adalah organisasi sendiri yang berupa jaringan. Lagi pula orientasinya adalah cita-cita (ideal) pemerintah "yang aktif" atau "pemerintah supervisi".³ Namun, pemfokusan pada aspek "E – Government" yang didukung oleh meningkatnya kebijakan pendukung terhadap multimedia (misalnya, penyaringan isi berita yang bersifat porno atau cabul dan ekstrim, perlindungan data dan pencipta, dan lain-lain) tidak boleh melalaikan rakyat. Karena komunikasi online interaktif telah memberikan informasi kepada mereka guna menentukan keputusan sendiri. "Gatekeeper" tradisional, perantara dan penentu opini dapat dihindari dengan lebih mudah, proses pembentukan pendapat dan kehendak tidak begitu

³ Bandingkan Stephan A. Jansen/Birger P. Priddat, *Electronic Government. Potensi baru bagi negara modern*, Stuttgart 2001; Thomas Gross, *Administrasi Publik di Internet*, dalam: *Administrasi Publik*, (2001) 4, h. 159 - 164

tergantung pada pelaku-pelaku dominan seperti partai dan mass media klasik. Karena itu kami selalu mengingatkan pada cita-cita ideal, yakni “rakyat yang mendapatkan informasi dengan baik,”⁴ tanpa terjebak pada ilusi bahwa dengan begitu langkah dari “demokrasi pemirsa” yang didominasi televisi menuju “demokrasi partisipasi” yang berbasis internet telah terlaksana. Tapi perlu pula untuk terus meningkatkan proses-proses politik melalui teknik digital dengan memperhatikan faktor kegunaan teknik itu daalam rangka meningkatkan partisipasi di negara-negara demokrasi menyangkut legitimasi inputnya.⁵

Pelaksanaan proses politik melalui teknik digital, seperti yang ingin kami tunjukkan disini, tidak semata-mata tergantung pada infrastruktur teknis dari aktifitas antar media, tapi juga pada interaksi secara nyata. Kebebasan memperoleh atau memberikan informasi secara efektif lebih penting daripada potensi mendapatkan akses dalam proses politik digital. Sudah sejak lama muncul deformasi “pasar gagasan” (demikian Pengadilan Konstitusi Amerika menyebut internet) yang disebabkan oleh efek samping dari komersialisasi dan regulasi pemerintah. Deformasi ini dipertajam lagi oleh konvergensi internet dan televisi. Di sini kami ingin menunjukkan kemungkinan-kemungkinan nyata terjadinya “peningkatan demokrasi” bersamaan dengan berjalannya proses politik.

II. Bentuk-bentuk komunikasi politik per on line

Kalau kita hendak membuat proses-proses komunikasi yang beranekaragam itu secara sistematis di internet, tidak akan mungkin dilakukan dalam bentuk yang sederhana karena tingkat diferensiasi komunikasi politik melalui internet dalam beberapa tahun saja sudah meningkat dengan cepat.⁶ Selanjutnya kita hanya dapat membayangkan kembali penopang dan format-format penting dari komunikasi politik per online dan mencoba untuk menyisipkannya dalam teori demokrasi sehingga kita

⁴ Bandingkan Clauss Leggewie, Netizens atau: Warga yang saat ini yang terinformasi dengan baik, dalam: Transit, 13 (1997), h. 3 – 25; Leggewie/Christoph Bieber, From Voice to Vote? Teknologi baru informasi dan komunikasi dalam demokrasi yang kompleks, dalam: Herbert Kubicek et.al. (Pen.) Jahrbuck Telekommunikation 1999. s. 257 - 268

⁵ Bandingkan dengan Pippa Noris (Pen.), Critical Citizens, Global Support for Democratic Gvernment, New York – Oxford 1999, idem., Digital Divide. Civic Engagement, Information Poverty, and The Internet Worldwide, Cambridge, Mass. 2001

⁶ Bandingkan: Pendahuluan Disertasi Gießen oleh Christoph Bieber, Proyek-Proyek Politik di Internet, Frankfurt/M. – New York 1999

dapat membuat konsep “demokrasi digital”. Menyangkut konsep ini, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Hal yang utama adalah fakta bahwa partai masih tetap sebagai pelaku yang dominan dalam sistem politik Republik Federal Jerman. Pada bagian ke dua dilakukan pembahasan tentang proses-proses politik yang sifatnya umum yang memberi kontribusi terhadap perkembangan dan modernisasi sistem-sistem demokrasi. Ini berarti, kami berangkat dari titik tolak rekayasa dan presentasi partai sebagai bagian dari masyarakat, kemudian beralih pada upaya mobilisasi partisipasi rakyat sipil dan kampanye untuk melibatkan seluruh warga. Di sini terlihat meningkatnya pilihan kepada “bentuk-bentuk (komunikasi) inkonvensional” partisipasi politik.

1. Pusat Partai Virtual

Pengamanan terhadap tawaran-tawaran partai politik telah dilakukan dari berbagai sudut pandang.⁷ Istilah “komunikasi partai melalui teknik digital” yang luas itu menggambarkan penggunaan berbagai teknologi komunikasi online yang berbasis internet di dalam atau melalui organisasi partai. Dengan memperhatikan perbedaan antara “Binnenkommunikation” (komunikasi di dalam) dan “Außenkommunikation” (komunikasi di luar) partai, komunikasi partai melalui teknik digital itu mencakup seluruh isi dan format dari proses-proses komunikasi online yang secara eksklusif atau primer dialamatkan pada fungsionaris atau anggota partai, atau kepada publik di luar organisasi.⁸

Munculnya bermacam-macam website politik dapat dilihat sebagai unsur penting bagi perkembangan komunikasi digital politik di Jerman. Tawaran-tawaran website ini sejak 1995 telah melewati “siklus produksi” yang bertingkat-tingkat. Awalnya partai hanya memanfaatkan materi-materi promosi yang tersedia yang mereka “masukkan ke dalam internet”. Kemudian di tingkat selanjutnya mereka menawarkan

⁷ Bandingkan: Dtelev Clemens, Kampanye di Internet, atau Christian Müller, Partai-Partai di Internet, dalam: Winand Gellner/Fritz von Korff (Pen.), *Demokrasi dan Internet*, Baden-Baden 1998, h. 143 – 156 dan 157 – 170; Robert Kaiser, Tawaran-Tawaran Informasi Politik melalui Internet. Partai dan Perkumpulan di World Wide Web, dalam: Klaus Kamps (Pen.), *Demokrasi Elektronik*, Opladen 1999, h. 175 – 190; Stefan Marschall, Partai dan Internet. Menuju Partai yang berbasis internet, dalam: *Aus Politik und Zeitgeschichte (Dari Politik dan Sejarah Kontemporer)*, B 10/2001, h. 38 - 46

⁸ Bandingkan: Ulrich Sarcinelli, Partai dan Penyampaian Politik, dalam: idem (Pen.), *Penyampaian Politik dan Demokrasi dalam Masyarakat Media*, Bonn 1998, h. 282 ff

berita-berita yang berhubungan dengan partai dalam bentuk “online magazin,” dan pada langkah pengembangan berikutnya mereka mengintegrasikan elemen-elemen anggota dan fungsionaris partai. Sementara itu, situs-situs partai di internet mulai beralih menjadi “web-portal politik” yang memungkinkan masuknya pemberitaan yang lebih khusus tentang politik di internet. “Web-portal politik” ini menunjukkan kuatnya orientasi pada penawaran jasa.⁹ Selain tawaran-tawaran online dari pihak partai yang bersifat sentral itu pada tahun-tahun belakangan ini muncul banyak website yang independen dan khusus dari lingkungan atau langsung dari organisasi partai.¹⁰ Bahkan fraksi-fraksi partai yang ada di parlemen mempunyai alamat sendiri di internet, seperti halnya organisasi-organisasi pemuda partai atau yayasan-yayasan dari partai tertentu.

Ada sedikit perbedaan antara situs internet yang ditawarkan partai dan fraksi dan oleh fungsionaris atau anggota; kalau situs partai atau fraksi dapat diakses oleh publik, sedangkan jaringan-jaringan yang dikembangkan fungsionaris atau anggota bersifat eksklusif yang hanya dapat diakses oleh orang tertentu dengan kata sandi dan berfungsi sebagai intranet. Pengembangan dan pemeliharaan keberadaan komunikasi online partai merupakan contoh untuk menerapkan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai tingkat partai. Pemakaian jaringan data intern selalu dirangkaikan dengan reorganisasi proses kerja yang ada. Meningkatkan fungsi pos-pos koordinasi dalam birokrasi partai dan revisi struktur kerja dan organisasi yang bersifat umum dapat dilihat sebagai dampak dari meningkatnya pengembangan teknik intern dan jaringan internet.¹¹ Dilihat dari perspektif ini ‘cabang-cabang partai’ digital yang terdapat di internet itu nampak sebagai puncak dari “gundukan informasi” intern organisasi yang pada dasarnya digiring oleh birokrasi partai.

2. Forum, chats dan peristiwa-peristiwa melalui online

⁹ Bandingkan: Christoph Bieber, *Komunikasi Partai di Internet: Modernisasi Partai-Partai anggota?* Dalam: Oscar W. Gabriel/Oskar Niedermayer/Richard Stöss (Pen.), *Demokrasi Partai di Jerman*, Bonn 2001

¹⁰ Selain itu web-site masing-masing politisi, apa yang disebut “Homepage-Politisi,” termasuk dalam spektrum “komunikasi digital partai” yang dalam banyak kasus muncul dari Partei-Site sebagai pengembangan “spin off”.

¹¹ Bandingkan: St. Marschall (Cat. Kaki 7), h. 40 ff

Sebagai format-format khusus dari komunikasi online politik dapat disebutkan di sini forum-forum diskusi, politisi-chats dan kegiatan-kegiatan online seperti “kongres partai virtual”. Forum diskusi intern partai yang umumnya didorong oleh banyaknya masukan melalui online yang telah memainkan peran penting bagi munculnya program online partai. Model aktifitas komunikatif yang khas dari tawaran-tawaran (program) online dengan para pengguna telah mendorong terbentuknya kelompok pengguna situs politik yang seringkali untuk rentang waktu yang lama mengadakan pembahasan politik dalam konstelasi personal yang berganti-ganti. Terbentuknya kelompok pengguna ini sejalan dengan tema-tema yang didiskusikan dalam website -partai.

Forum-forum diskusi itu sejak 1998 dilengkapi (kadang-kadang terdesak) oleh online-chats yang dapat dilihat sebagai program publik yang waktunya terbatas, temanya terfokus, dan yang di dalamnya ikut serta pula tokoh-tokoh terkenal/selebriti. Program ini dibuat secara berurutan dan berkala. Chats mengambil alih fungsi yang serupa seperti forum diskusi, yakni memperantarai kontak antara warga (rakyat) dan politik dalam bentuk pertukaran yang terorganisasi dan bisa diakses publik. Format yang mendominasi dari jenis chats ini adalah program “chats-kampanye” yang muncul secara rutin, tapi kejadian-kejadian politik lain seperti kongres partai juga mendorong munculnya situs-situs politisi. Selama ini politisi chats lebih mengambil alih fungsi atau peran yang bersifat rekayasa dan simbolis, daripada isi programnya sendiri. Memang diskusi di chats umumnya berlangsung secara objektif dan argumentatif, namun dipersoalkan apakah proses-proses komunikasi ini terintegrasi dalam tindakan-tindakan nyata politik.¹² Kekurangan yang terjadi di sini khususnya adalah tidak adanya pengikatan secara efektif dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam komunikasi dan tidak adanya simulasi oleh unsur-unsur pseudointeraktif dan demoskopis.

Sebagai perbandingan, kita dapat menyetengahkan elaborasi aktifitas komunikasi yang ditampilkan Partai Bündnis 90/Partai Hijau di Baden Württemberg pada

¹² Tentang isi komunikasi chats yang khas itu dapat dilihat dalam dokumentasi yang dibuat oleh penawar situs seperti politik-digital (www.politik-digital.de/salon/transcripte) atau stern.de (www.stern.de/politik/chataktuell/archiv). Bandingkan dengan Christoph Bieber, Politische Online-Inszenierung, dalam: Hans J. Kleinsteuber (Pen.), Tren Media Aktual di AS, Wiesbaden 2001, h. 265 - 279

November 2000, yakni melalui program “Kongres Partai Virtual” (www.virtueller-parteitag.de). Pada *event* online ini seluruh anggota perkumpulan partai di negara bagian dapat mendiskusikan dan mengomentari dua agenda utama melalui situs yang mereka buat sendiri. Sementara para wakil (yang didelegasikan) berhak mengikuti pemungutan suara secara digital melalui naskah permohonan. Penilaian awal terhadap jalannya dan manfaat kegiatan atau program digital menunjukkan bahwa pengalihan proses-proses komunikasi dan pengambilan keputusan dapat dilakukan ke dalam ruang data, namun perlu dicatat bahwa partisipasi pada kegiatan-kegiatan online harus melalui persyaratan tertentu.¹³ Selain itu tendensi kepada “individualisasi” partisipasi terlihat mencolok. Memang melalui kegiatan online itu terbuka peluang-peluang baru yang lebih fleksibel, tapi daya ikat peristiwa “kongres partai” yang diharapkan, melemah.

3. Organisasi Partai Digital

Di bidang organisasi partai internet juga telah berkembang sebagai lahan aksi yang kreatif dan telah mendorong munculnya “anak-anak partai virtual”. Contoh yang paling terkenal untuk kasus ini ditunjukkan oleh program “perkumpulan partai lokal dan negara bagian virtual” yang sukses didirikan tahun lalu. Pernyataan-pernyataan seperti ini dapat dijadikan contoh bagi tingkat organisasi baru yang penggabungannya ke dalam kerangka struktur partai yang berlaku sampai saat ini baru dimulai. Ciri yang paling penting dari struktur ini adalah “bentuk virtualnya” yang telah melampaui konstruksi regional anak/cabang partai yang umum dan biasanya tidak lagi menuntut adanya proses formal menjadi anggota organisasi partai. Jadi, di sini terjadi perkembangan yang revolusioner, khususnya kalau kita memperhatikan bahwa di sini ada pembalikan prinsip teritorial dan keanggotaan penuh. Ini merupakan perkembangan baru dalam organisasi partai yang berlaku selama ini.

¹³ Bandingkan: Till Westermayer, Apa yang terjadi jika partai melakukan kongresnya di internet? “Kongres Partai Virtual” Bundnis 90/Partai Hijau dilihat dari perspektif sosiologi, Freiburg 2001 (www.westemayer.de/till/uni/parteitag-im-netz.pdf). Serupa dengan “Bürgerprogramm 2002” (www.buergerprogramm2002.de) milik FDP dan “e Manifest – Bildung für freie Menschen” oleh yayasan Heinrich Böll (www.Bildung2010.de) di mana dalam sebuah setting yang dihubungkan dengan diskusi-diskusi partai politik para peserta yang telah terdaftar (untuk FDP pesertanya anggota partai) membahas sebuah naskah yang disusun secara kolektif dalam sebuah “lingkungan kerja yang virtual”. Mekanisme kerjanya mirip dengan metode Kongres Partai Virtual, yakni mengkoordinasikan agenda-agenda utama.

Perintis perkembangan ini adalah “perkumpulan lokal virtual” dari Partai Sosial Demokrat/SPD (VOV, www.vov.de) yang berdiri pada Juni 1995, resminya sebagai “pokja di tubuh pimpinan partai” dan tidak memiliki status perkumpulan lokal reguler. Contoh ke dua adalah situs perkumpulan negara bagian yang didirikan pada Juli 2000, milik Partai Demokrat Liberal (FDP) (lv-net,www.fdp-lv-net-de). Situs FDP ini ingin mendapatkan status istimewa sebagai “kelompok luar negeri yang sesuai dengan aturan federal” karena pengelompokkan “sebagai perkumpulan negara tidak dapat dipahami secara teritorial” (www.fdp-lv-net.de).¹⁴ Menyangkut keanggotaan partai, model liberal juga mengarah pada pembukaan struktur-struktur partai yang masih bersifat tradisional, tapi masih dibedakan dulu berdasarkan “anggota-anggota” (yang berhak memberikan suara) dan “para pendukung” (yang berhak mengikuti diskusi).

Kelompok-kelompok organisasi pendukung partai politik yang baru ini tampaknya harus diformalkan dalam struktur yang telah terbukti ketangguhannya agar dapat memberikan pengaruhnya pada struktur kekuasaan organisasi partai yang ada. Dalam proses formalisasi itu diupayakan untuk menemukan titik awal dalam melakukan modernisasi secara perlahan dan hati-hati dan hasil-hasil rekrutmen kelompok-kelompok organisasi pendukung partai virtual dijadikan argumen untuk merealisasikan pembaharuan struktural. Penciptaan platform kerja yang otonom, terikat pada tema bagi anggota dan bukan anggota dapat dilihat sebagai langkah pengembangan kelompok-kelompok virtual menuju eksistensi yang dapat bertahan dalam struktur organisasi partai politik.

4. Kampanye melalui online

Pada kampanye pemilihan kanselir 1998, internet telah menjadi arena komunikasi politik. Namun, ketika itu sebagian besar partai dan kandidat baru memanfaatkan jaringan itu sebatas percobaan.¹⁵ Menjelang pemilihan kanselir tahun depan, jaringan komputer intern partai merupakan unsur strategis yang penting bagi

¹⁴ Pengakuan formal sebagai kelompok anggota “bundesmittelbar” yang tidak termasuk perkumpulan negara bagian atau lokal lain dimaksudkan diberikan dalam rangka kongres partai tingkat federal FDP tanggal 4 sampai 6 Mei 2001. Perkumpulan PDS di negara bagian juga membuka situs www.pds-iv17.de yang mengorganisasikan kerja politiknya di internet dan membahas topik-topik intra relevan.

¹⁵ Bandingkan Claus Leggewie/Christoph Bieber, Internet sebagai arena kampanye, dalam: *Harian Süddeutsch* tanggal 5./6.9.1998

terciptanya kampanye yang profesional. Setidaknya sudah dua partai, yakni CDU dan SPD yang mulai hari ini bermaksud meluaskan jaringan tawaran internet dan intranet mereka dalam rangka memungkinkan mobilisasi yang cepat dan menyeluruh basis partai yang aktif dan melibatkan kelompok-kelompok partai dalam kampanye.

Sebagai contoh dapat diambil peristiwa penerapan media baru secara massal dalam kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2000, di mana internet tidak hanya berfungsi sebagai saluran pelengkap dalam rangka menjalankan materi promosi, melainkan juga dijadikan alat perluasan dan refinansialisasi (pendanaan kembali) kampanye.¹⁶ Dalam kampanye-kampanye pemilihan di tingkat negara bagian dan komunal di Jerman telah terbentuk model spesifik “online-campaigning” yang masih tetap bergantung pada internet sebagai media promosi. Tawaran-tawaran situs yang berorientasi kepada individu untuk calon-calon utama dan calon dari daerah pemilihan saat ini telah menjadi standar, namun jaringan strategis dengan “kampanye analog” selama ini hanyalah kasus istimewa dan besar kemungkinannya pada kampanye pemilihan kanselir yang akan datang belum terlaksana secara sempurna.

Memang diperkirakan akan terjadi peningkatan proses pemasukan program *chat* atau *online event* yang lain ke dalam kalender kampanye kandidat, tapi pada saat bersamaan peristiwa-peristiwa seperti ini semakin mencontek model “Politainment – Formate” lama untuk kemudian dibawa ke dalam lingkungan media baru. Perkembangan ini dapat dianggap sebagai contoh bagi kemungkinan terjadinya kolonisasi media baru oleh media lama (media yang terfokus pada TV), dan ini sangat disayangkan. Ini terjadi karena media baru menangani potensi asli komunikasi online tidak sesuai dengan nilainya. Pengembangan dan pemeliharaan situs kampanye yang berorientasi pada tema berdasarkan model FDP di Nordrhein-Westfalen (www.nrwbrauchttempo.de) cukup menjanjikan kesuksesan, tapi harus mengeluarkan materi dan investasi personal yang cukup besar. Sementara penerapan unsur-unsur yang bersifat permainan (games) dan upaya

¹⁶ Bandingkan Christoph Bieber, Millennium – Campaigning. Kampanye Pemilihan Presiden AS tahun 2000 di internet, dalam Klaus Kamps (Pen.), Trans-Atlantik, Trans-Portable? Thesa Amerikanisasi dalam Komunikasi Politik, Wiesbaden 2000, h. 93 - 110

mengintegrasikan penggunaan E – Commerce ke dalam komunikasi kampanye besar kemungkinannya tidak akan memberi fungsi yang berarti.

Jika format-format baru kampanye benar-benar berkembang, seperti misalnya diskursus online partai dan kandidat yang sifatnya lintas sektoral, maka itu pun bukan atas inisiatif pelaku kampanye melainkan didorong oleh kepentingan pribadi pelaku media atau orang yang menawarkan situs internet atau kepentingan “pelaku-pelaku kampanye digital” yang baru muncul ketika kampanye per online dilakukan. Tren ini membenarkan dugaan penelitian perilaku partisipasi bahwa ada peningkatan preferensi terhadap mobilisasi di luar parlemen dan partisipasi inkonvensional yang terjadi secara parallel dengan munculnya tendensi sikap apatis dan aversif menentang politik profesional. Tendensi ini dalam istilah halusnya disebut dengan keacuhan terhadap politik (Politikverdrossenheit). Dalam konteks ini, komunikasi-online yang disifatkan sebagai komunikasi massa yang individualis itu dapat mendorong munculnya tendensi untuk mengkotak-kotakkan masyarakat yang sudah dilakukan sebelumnya oleh media lama.¹⁷

5. Online – Protest

Sebagai ‘imbas’ dari kampanye via online yang dilakukan “dari atas” (oleh kandidat/politisi), sejak pertengahan tahun 90-an muncul juga “kampanye dari bawah” yang menjadikan internet sebagai media yang menarik bagi komunikasi politik mereka. Umumnya kampanye politik mereka ini dalam bentuk aksi protes. Kalau pada saat itu banyak kampanye lewat online masih ditolak atau tidak dipahami, maka dalam dua tahun belakangan ini situasinya telah mengalami perubahan secara mendasar. Sejalan dengan terbentuknya arena online untuk bidang politik, lahan untuk melakukan komunikasi berbentuk protes juga meluas. Yang menjadi sasaran protes melalui internet ini adalah pelaku politik atau politisi secara kolektif.

¹⁷ Bandingkan Jochen Fuhrmann/Arno Orzessek (Pen.), Masyarakat yang tersebar (Zerstreute Offentlichkeiten, München 2001

Dalam beberapa kasus sistem politik menunjukkan fleksibilitasnya terhadap protes-protes melalui internet tersebut.¹⁸ Sementara itu telah terjadi pula pengembangan “teknik-teknik protes” lama dalam penerapan protes di internet. Dalam proses pengembangan itu seringkali bidang yang disebut “seni jaringan”lah (Netzkunst) yang mengambil alih paten dan hak cipta metode-metode baru protes politik melalui online. Seperti yang sudah pernah terjadi dalam kasus “Electronic Disturbance Theatre” yang berpartisipasi besar pada penerapan “virtuellen Sit-Ins” yang pertama, aktifitas kelompok “etoy” (www.etoy.com) dapat ditempatkan pada batas antara seni jaringan dan aktifitas jaringan yang bermotivasi politik. Contoh yang paling terkenal untuk ini adalah perselisihan antara kelompok “etoy” yang kemudian menjadi terkenal sebagai “Toywar” (bandingkan: www.toywar.com) dan pengusaha barang mainan digital “eToys” (www.etoys.com). Dengan mengumpulkan banyak informasi, himbauan boikot dan aksi protes langsung para kelompok seniman itu berhasil menghalangi toko mainan itu menjual barangnya di sepanjang Natal dan membuat bursa saham eToys anjlok.

Juga protes melawan “lufthansa.com” dilakukan dengan memanfaatkan hubungan antara seni internet dan protes melalui internet karena yang diterapkan di sini adalah konsep dan teknik “virtuellen Sit-Ins”. Dengan teknik yang mereka beri nama serangan “Denial-of-Service”, “virtuellen Sit-Ins” telah berkembang menjadi unsur penting dalam repertoar proses digital. Format protes ini sekaligus juga telah memicu munculnya diskusi hangat tentang tema apakah aksi-aksi seperti ini dapat digunakan dalam politik. Untuk membuat sebuah server ambruk atau hancur (“Denial-of-Service”, DoS) disebabkan banyaknya jumlah permintaan yang datang bersamaan, tidak dibutuhkan banyak internet-surfer karena “protes” dapat juga disimulasikan melalui jalur ‘mesin’.

“Otomatisasi protes” ini memiliki titik yang dapat menjadi incaran kritik: serangan – DoS yang bersifat buatan atau yang dilakukan dengan tingkat keotentikan yang tidak jelas alias rendah tidak mempunyai nilai “politis” karena keotentikan protes tidak terjamin. Karena itu para aktivis online berulang-ulang menekankan keinginan mereka untuk membeberkan teknik-teknik protes yang digunakan untuk membuka

¹⁸ Bandingkan Christoph Bieber, Komunikasi Protes di Internet, dalam: Bernd Holznagel (Pen.), *Electronische Demokratie*, München 2000

peluang dilakukannya proses pengotentikan peserta. Agar pernyataan opini tentang politik di internet dapat diakui, perbedaan antara komunikasi “terbuka/publik” dan “anonim” memainkan peran yang sangat penting.

Organisasi protes digital tidak hanya terjadi dalam batas negara atau domain, tapi juga membuka peluang bagi kerjasama atau konfrontasi dengan pelaku-pelaku internasional. Potensi laten globalisasi ini paling jelas terungkap pada munculnya jaringan protes di seluruh dunia yang nampaknya telah menemukan sumber identitas dan peluang organisasi di internet. Situs portal “protes.net” (www.protes.net) misalnya mencatat kalender yang berisi kegiatan-kegiatan protes yang merujuk pada sejumlah besar situs-situs protes khusus yang berkonsentrasi pada upaya atau pelayanan mendampingi aktifitas online berbagai “pelaku globalisasi”. Tidak heran jika ditemukan pengumuman atau pemberitahuan rutin tentang peristiwa-peristiwa yang akan dilakukan; selain itu ada situs web yang memberikan petunjuk yang pasti menyangkut pelaksanaan aksi protes di tempat kejadian dilakukan. Lebih jauh lagi, platform online seperti, “Z – Magazine” (www.zmag.org) atau “Independent Media Center” (www.indymedia.org) mendukung terbentuknya suatu masyarakat alternatif guna melawan pemberitaan *mainstream media*.

Hal yang patut diperhatikan adalah pandangan realistis dan sederhana para pembuat media online ini. Bagi mereka tidak mungkin mengorganisasikan protes para “penentang globalisasi” jika tidak ada pertukaran informasi secara langsung. Mereka juga mendapatkan kesulitan melepaskan etiket atau lebel yang keliru ini yang dicapkan *mainstream media* kepada para kritikus globalisasi ini dan kepada pendukung globalisasi yang mencakup kehidupan sosial dan ekologi. Sikap kritis terhadap jalinan erat ekonomi dunia dan pemanfaatan media yang kiranya dapat digambarkan sebagai “media global” par excellence sama sekali tidak saling bertentangan. Sebaliknya internet adalah “agenda-media” asli yang dapat membantu terlaksananya motto “berpikir global, bertindak lokal”.

III. Proses-proses politik digital

Proses-proses politik lain juga dapat dilakukan melalui teknik digital atau internet. Kegiatan-kegiatan rutin yang menjadi bagian dari sistem politik seperti pengorganisasian pemilihan, tindakan administrasi yang efisien serta pelibatan warga dapat dirangkum dalam dunia internet sebagai objek “komunikasi politik”. Di bawah ini diuraikan ikhtisar dari kegiatan-kegiatan tersebut.

1. E – Voting: memilih per Mausclick?

Sejak munculnya komunikasi online, pemberian suara melalui internet bagi banyak orang adalah mahkota “demokrasi elektronik”. Memang pada kenyataannya pemberian suara virtual dapat diterapkan. Ini sejalan dengan kemajuan kriptografi dan “signatur digital” dalam perdagangan elektronik. Banyak pendukung proses pemilihan melalui internet berharap terjadinya pembalikan tren mundur pada partisipasi dalam pemilihan.

Akan tetapi, keinginan untuk menerapkan E-Voting harus berhadapan dengan dua alasan yang dapat menggagalkan realisasinya. Pertama, teknologi pemungutan suara melalui internet tidak begitu aman dan dari perspektif institusi bukannya tidak bermasalah, seperti yang diklaim oleh pendukungnya (dan pihak-pihak yang ingin terlibat karena alasan komersial).¹⁹ Ke dua, (ini lebih penting), potensi-potensi penting media interaktif akan menjadi sia-sia jika makna “demokrasi digital” hanya dipahami sebagai wadah menciptakan alat bantu teknik baru. Perkembangan ke arah ini ditunjukkan oleh metode di Amerika (seperti vote.com) yang semakin disukai oleh pelaku-pelaku di Eropa meskipun perbedaan antara jajak pendapat dan voting menjadi kabur. Dan meski pada kenyataannya, dalam perpanjangan demokrasi digital yang bersifat pseudo-partisipatif, yang menonjol dari realisasi metode itu adalah “populisme elektronik” yang oleh para kritikus disinyalir sebagai ancaman bagi demokrasi perwakilan.

Di masa yang akan datang diperkirakan kebutuhan pemerintah untuk bertindak semakin besar, untuk itu perlu dibuka peluang bagi realisasi proses pemungutan

¹⁹ Bandingkan: Hubertus Buchstein, Präzenswahl, Briefwahl, Onlinewahl und der Grundatz der geheimen Stimmabgabe (pemilihan langsung, pemilihan melalui surat, pemilihan per online dan prinsip dasar pemberian suara secara rahasia), dalam: Majalah untuk masalah-masalah parlemen, 31 (2000) 4, h. 886 - 902

suara di internet (E-Voting). Dengan catatan harus memperhatikan “nilai plus” yang konkrit bagi warga pemilih. Pendekatan-pendekatan yang selama ini dilakukan untuk memperoleh solusi bagi problematika E-Voting terlalu mengedepankan aspek rasionalisasi pengorganisasian proses pemilihan, sementara peluang baik bagi pemilih maupun bagi orang yang harus dipilih terabaikan.²⁰

Andaikata metode E-Voting di masa depan tetap dikonsepsikan seperti penerapan “E – Business” politik. Ini mungkin bisa menimbulkan dampak kontradiktif terhadap akseptasinya. Artinya, pengembangan lingkungan-lingkungan komunikasi yang aman untuk perdagangan elektronik dapat menyebabkan larinya kelompok-kelompok pengguna jaringan online yang potensial. Kelompok-kelompok pengguna ini khawatir dengan adanya tuntutan-tuntutan keamanan yang tinggi dan tidak memadainya kemungkinan-kemungkinan penyerahan suara melalui internet dan informasi umum tentang proses pemilihan. Untuk dapat mengimbangi efek-efek negatif seperti ini, proses pemungutan suara digital yang berorientasi pada “ E – Business “ itu harus diadakan dilingkungan online yang mampu dikomunikasikan dan didiskusikan .

2. Partisipasi warga di Internet

Di era internet ini, keterlibatan warga pada proses politik mengalami kemajuan. Partisipasi mereka ‘ berbeda ‘ dari keterlibatan yang selama ini terjadi. Rakyat yang ingin berpartisipasi menemukan forum-forum diskusi terbuka dari pusat partai secara virtual dan media politik online serta wadah-wadah komunikatif di ruang data. Dampaknya adalah muncul suatu bentuk masyarakat yang bertemu di dunia maya (virtual), meski hanya bersifat temporer dan terkait dengan topik-topik tertentu. Bentuk masyarakat ini dapat mempererat komunikasi lokal melalui masalah-masalah politis-administratif dan memperluasnya ditingkat global dengan cara melibatkan kelompok-kelompok individu yang secara fisik tidak hadir tetapi secara tematis

²⁰ Jarang sekali kontribusi terhadap diskusi-diskusi tentang penerapan metode E-Voting merefleksikan masalah ini, sebaliknya lihat Herbert Kubicek/Martin Wind, Memilih per Internet. Perbedaan dan persamaan pemilihan per online untuk parlemen studi dan parlemen Jerman (Bundestag), dalam: Administrasi dan Manajemen. Majalah Administrasi Umum, (2001) 3, h. 132 - 141

tersangkut dan tertarik dan menyiapkan arsitektur jaringan yang mengkombinasikan informasi, kepentingan dan kompetensi.

Bentuk-bentuk partisipasi yang baru tidak hanya muncul oleh karena adanya keterikatan dengan proses-proses politik yang juga ada, tapi juga tercipta sendiri melalui proyek-proyek online inovatif yang selama ini jarang sekali dipahami sebagai bentuk dari “ keterlibatan warga “. Banyak dari platform informasi, komunikasi dan aksi yang muncul di internet dari tahun-tahun belakangan ini merupakan produk dari keterlibatan atau partisipasi warga , yakni para pelaksana online , programmer, pengarang dan teknisi. Mereka ini memberikan sebagian besar kemampuan mereka untuk proyek-proyek politik di internet atas dasar kehormatan atau bukan untuk mencari materi.

Chaos Computer Club (CCC) yang dihargai dan ditakuti itu dapat dijadikan model atau contoh bagaimana teknologi dapat diubah menjadi modal sosial. Para anggota klub ini sangat kompeten dalam berhubungan dengan sistem komputer, dan kompetisi yang telah mereka peroleh dari pengalaman bertahun-tahun ini mereka gunakan untuk menunjukkan titik-titik lemah infrastruktur komunikasi digital atau untuk mendiskreditkan upaya campur tangan dan regulasi pemerintah. Tokoh-tokoh utama CCC seperti Wau Holland yang belum lama meninggal itu atau Andreas Müller – Maguhn beberapa kali diundang sebagai tenaga ahli untuk mengadakan dengar pendapat dalam rangka menentukan keputusan di lingkungan politik federal. Selanjutnya sebagai utusan wilayah yang terpilih untuk Eropa Müller - Maguhn dalam kapasitasnya sebagai direktur ICANN hendak merealisasikan model “keterlibatan warga dunia “ (Weltbürgerschaftliches Engagement) .

Pembahasan tentang tema kebebasan informasi , perlindungan data dan penyalahgunaan data tidak hanya dilakukan karena adanya kasus *hacker-hacker* di Hamburg lalu. Akan tetapi, perkumpulan-perkumpulan seperti “ perhimpunan pemberdayaan lalu lintas data umum bergerak dan tidak bergerak “ (Foebud, www.Foebud.org) dan “ perkumpulan pemberdayaan teknik informasi dan masyarakat “ yang terdaftar di Munchen (Fitug, www.Fitug.de) juga memberikan program online menyangkut tema tersebut di atas. Dengan koleksi informasi yang luas

mereka menawarkan bantuan penting untuk memperoleh orientasi dalam problematika baru politik yang bagi banyak orang tidak dapat diterka.

Dengan adanya peran serta warga dalam menentukan diskursus tersebut di atas maka budaya jaringan (internet) menjadi lebih mantap dan luas. Perkumpulan mikro di Berlin ([www. Mikro.org](http://www.Mikro.org)) mengkhususkan bidang operasi atau kerja mereka pada “ pemeliharaan budaya internet “, membuat program dan kegiatan budaya yang berbobot dan juga menangani pengorganisasian kegiatan-kegiatan yang berpengaruh bagi publik. Motivasi mendasar anggota perkumpulan adalah adanya kebutuhan akan “pembahasan kritis tentang dampak budaya, sosial dan politik dari penerapan teknologi media dalam masyarakat sekarang “ dan untuk menyiapkan “Plattform bagi suatu pembahasan tentang penggunaan teknologi media yang kompeten, kritis dan sadar.”²¹

Selain partisipasi yang muncul karena adanya topik politik yang telah ditentukan sebelumnya, ada juga andil yang bersifat sukarela. Misalnya seperti yang dilakukan perkumpulan di Berlin Poldi. Net. Perkumpulan ini mengkhususkan diri membahas perkembangan demokrasi dan digital masyarakat informasi Eropa. Untuk ini Poldi. Net membuat dua situs, yakni [www.politik. de](http://www.politik.de) dan [www. Europa –digital.de](http://www.Europa-digital.de) yang sejak pemilihan konselir yang lalu telah berkembang menjadi plattform politik di internet yang mendapat perhatian besar.²²

Kalau perkumpulan-perkumpulan jaringan (internet) dalam munculnya wacana “politik melalui internet “ menampilkan sejenis “suara-suara “ rakyat, di tingkat implementasi politiknya sendiri terdapat kemungkinan-kemungkinan inovatif untuk berpartisipasi melalui media. Di sini peluang seperti pemanfaatan ekspertisi (rekomendasi ahli) untuk metode pembuatan perencanaan, mediasi atau pembuatan undang-undang dapat di sebut sebagai salah satunya peluang. Pelaku-pelaku yang mungkin memberikan andil adalah “jaringan-jaringan warga “ yang banyak terdapat di daerah yang menangani perhubungan didaerah-daerah kecil di wilayah negara

²¹ Bandingkan : [http:// www. Mikro. Org / Doku 98-99 / allg-d. htm](http://www.Mikro.Org/Doku/98-99/allg-d.html)

²² Tawaran politik digital mendapat penghargaan Grimme online Award pada juni 2001. alasan juri terhadap penganugerahan itu adalah pemanfaatan “internet sebagai perluasan ruang publik “. Pembuat programnya berpartisipasi sebagai anggota pimpinan / ketua atau kuratorium dalam kegiatan perkumpulan tersebut.

bagian, Komune (swapraja) atau wilayah kota dan memberikan dukungan besar bagi perluasan “kompetensi media digital”. proyek-proyek internet yang bersifat non komersial ini sering pula mendukung program-program klasik yang ditawarkan oleh pemberi jasa informasi publik dan melengkapi spektrum usaha mereka dengan inovasi baru serta menjadi contoh bagi pelaku politik. Di sinilah terjadi proses penjembatan dari E-Government menuju E-Democracy.

3. Diskursus Internet

“Regierung durch Diskussion “ (pemerintahan melalui diskusi), semboyan ini tertera dalam teori dan gagasan politik yang diperoleh dari hasil penelitian dan kualifikasi mayoritas secara demokratis sebelum dan sesudah diskusi dibuka di Internet. Motto ini tidak hanya menggambarkan perlunya diadakan pemungutan suara menyangkut persoalan-persoalan politik yang masih diperdebatkan, tapi juga perlunya penekanan legitimasi terhadap keputusan-keputusan dengan cara pembahasan suatu masalah secara menyeluruh dan teliti di masyarakat.

“Keputusan harus diambil “, begitulah bunyi asas dasar keputusan politik yang dalam negara demokrasi perwakilan biasanya dilakukan oleh wakil rakyat yang terpilih dengan suara terbanyak / mayoritas. Sementara deliberalisasi publik dalam pengertian “demokrasi partisipatif “ dapat memperbaiki kualitas keputusan ini apalagi karena keputusan itu tidak hanya menjadi hak para elit, tapi dalam berbagai intensitas juga harus melibatkan opini publik dan opini yang di publikasikan. Bentuk komunikasi ini terjadi dalam wacana-wacana publik dengan format yang berbeda-beda, dan media online menjadi wadah yang mengorganisasikan diskursus tersebut.

Kembali pada contoh bentuk-bentuk partisipasi warga yang disebutkan di muka, yakni chats dan forum online dari pihak partai, kita sadari bahwa dua bentuk ini pada dasarnya mempunyai struktur yang lemah dan obyeknya bersifat terbuka untuk siapa saja. Konggres partai virtual atau program debat yang di atur berdasarkan undang-undang kebebasan memberi dan memperoleh informasi harus mempunyai batasan tema dan harus di moderatori. Penelitian (yang selama ini tidak memadai) tentang kenyataan dan dampak E-Diskursus seperti ini menunjukkan bahwa format partisipasi itu masih sangat dipengaruhi oleh konvensi media yang berlaku selama ini. Fungsi “ berbicara/menulis “ (ekspresi) lebih banyak dilayani dari pada fungsi

“mendengarkan “ (resiprositas/timbal balik), “menjawab” (respons), “melihat aspek atau titik tolak yang lain “ (empati) dan “meyakinkan / diyakinkan “ (persuasi).

Eksperimen-eksperimen yang dilakukan melalui jajak pendapat, tim-tim perencanaan digital dan mediasi konflik secara virtual membuktikan bahwa komunikasi online membuahkan hasil yang menakjubkan jika dimoderatori dengan pas.²¹ Kualifikasi pembahasan melalui media interaktif merupakan tantangan yang sesungguhnya bagi masyarakat sipil yang disarankan untuk meningkatkan aktifitas sendiri dan inisiatif sendiri serta bagi pemerintah dalam mengorganisasikan tindakannya. Tindakan pemerintah harus disesuaikan dengan gambaran ideal “pemerintah musyawarah” dan demokrasi kooperatif.

IV. Pandangan di masa depan

Sebagai penutup kiranya perlu dipikirkan bagaimana caranya agar komunikasi politik melalui on line dapat terus berkembang dalam satu konteks di mana ciri eforia komersial tahun 90-an tidak nampak lagi dan dalam perkembangannya harus menyesuaikan diri dengan pendapat yang menyatakan bahwa internet telah “mati” dan karenanya tidak perlu terlalu memfokuskan proses-proses politik melalui media baru tersebut. Namun demikian masih ada upaya untuk menarik lebih banyak orang ke dalam jaringan tersebut. Ini terlihat pada program “internet untuk semua” yang bertujuan mengaktifkan “Inter-Nots” (kebutuhan akan internet), sementara kelompok-kelompok tertentu (perempuan, manula, kelompok etnis minoritas, orang-orang yang kurang memperoleh pendidikan resmi) kurang diperhatikan. Selain itu program itu juga bermaksud menarik kembali para “user” yang frustrasi.

Dari sudut pandang politik demokratis harus dibuat syarat-syarat bagi yang ingin mengakses program di internet. Privatisasi dan komersialisasi web sites yang berjalan dengan lancar serta perubahannya yang perlahan-lahan menjadi “media bayaran” tidak dapat diterima begitu saja. Akan tetapi, ini bukan pula berarti

²³ Bandingkan dengan Anthony G. Wilhelm, *Democracy in the Digital Age*, New York 2000. Tentang bidang tema ini kami juga mempublikasikan sebuah laporan dari proyek “Evaluasi ITA berbasis internet “yang masih berlangsung sampai sekarang.

komunikasi politik melalui on linedibuat seperti model radio publik.²² Mungkin saja liberalisasi ekonomi – yang efek sampingnya pengeksploitasian kelompok-kelompok pengguna yang lain (user) – membuat komunikasi on line dalam dimensi telepon, radio dan televisi saat ini menjadi tersedia dan dengan demikian internet menjadi media massa yang efektif. Tapi dalam perluasannya peningkatan kualitas komunikasi politiknya sama sekali tidak terlihat. Bobot komunikasi politiknya justru dapat dicari pada program pendalaman pembahasan politik. Berdasarkan pengalaman hanya sedikit “orang-orang yang aktif di politik” ikut ambil bagian pada program pendalaman pembahasan politik tersebut. Karenanya untuk melengkapi peserta diundanglah “orang-orang di jalan”. Pengundangan ini disesuaikan dengan poin-poin yang dibahas dan alasan pelaksanaan kegiatan. Berangkat dari premis yang menuntut arsitektur komunikasi yang variabel dan fleksibel ini warga yang terinformasi dengan baik masih memiliki potensi luas yang dapat terus digali.

²² Bandingkan Claus Leggewie, Netzbürger ohne Lobby (Warga internet tanpa lobi), dalam: harian “Die Zeit”, Nr 8/2001

Jürgen Krönig

Dipl. Politolog, koresponden luar negeri untuk harian "Die Zeit" di Britania Raya

Alamat : E-Mail: juergen@kroenig.fsnet.co.uk

Publikasi antara lain tentang tema-tema globalisasi, kebijakan media dan ekonomi.

Thomas Leif

Dr., M.A., Phd., lahir 1959; reporter kepala pada Televisi SWR, siaran daerah Mainz; ikut menerbitkan majalah caturwulanan jurnal Penelitian Gerakan Sosial Baru.

Alamat: Marcobrunner Jl. 6, 65197 Wiesbaden

E-Mail : thomas.leif@faberdesign.de

Publikasi antara lain: Kekuatan (ketidaksadaran) strategis gerakan perdamaian. Struktur-struktur komunikasi dan pengambilan keputusan di tahun 80-an, Opladen 1990; (bersama dengan Joachim Raschke) Rudolf Scharping, SPD dan kekuasaan, edisi kedua., Reinbek 1994.

Otfried Jarren

Dr. Phd., lahir 1953; Guru Besar Ilmu Publisistik; direktur Institut Ilmu Publisistik dan Penelitian Media (IPMZ) dan SwissGIS, Swiss Centre for Studies on the Global Information Society pada Universitas Zürich.

Alamat : IPMZ-Institut Ilmu Publisistik dan Penelitian Media, PO. BOX 507, CH-8035 Zürich. E-Mail: o.jarren@ipmz.unizh.ch

Publikasi antara lain: (bersama dengan P. Donges) Regulasi Media oleh Masyarakat?, Opladen 2000; (pen. bersama dengan H. Bonfadelli) Pengantar Ilmu Publisistik, Bern-Stuttgart-Wina 2001.

Christina Holtz-Bacha

Dr. Phd., lahir 1953; Guru Besar Publisistik pada Universitas Mainz.

Alamat : Institut Publisistik, 55099 Mainz.

E-Mail : christina.holtz-bacha@uni.mainz.de

Publikasi antara lain: (Pen) Kampanye di Media – Kampanye dengan Media, Opladen-Wiesbaden 1999; Kampanye sebagai Budaya Politik. Iklan-Iklan Pendek di Televisi 1957-1998, Wiesbaden 2000.

Barbara Pfetsch

Dr. Phd., lahir 1958; Guru Besar Ilmu Komunikasi, khususnya Politik Media pada Universitas Hohenheim.

Alamat : Fruwirthstrasse 47, 70599 Stuttgart.

E-Mail : pfetsch@uni.hoheim.de

Publikasi antara lain: (bersama dengan W. Donsbach, H.M. Kepplinger dan O. Jarren) Permainan Relasi (Beziehungsspiele) – Media dan Politik dalam Diskusi Publik, Gütersloh 1993; Budaya Komunikasi Politik, Opladen 2002 (i.E)

Claus Leggewie

Dr. disc.pol., lahir 1950; Guru Besar Ilmun Politik pada Universitas Justus-Liebig Gießen, Fellow am Remarque Institute Universitas New York.

Alamat : Universitas Gießen, Institut Ilmu Politik, Karl-Glöckner-Str. 21 E, 35394 Gießen.

Publikasi antara lain : Amerikas Welt. Die USA in unseren Köpfen (Dunia Amerika. Amerika Serikat dalam Pikiran Kita), Hamburg 2000; (Pen. bersama dengan R. Münch) Politik di Abad ke –21, Frankfurt /M. 2001

Christoph Bieber

Dr. rer.soc., lahir 1970; Ilmuwan pada Institut Ilmu Politik Universitas Justus-Liebig Gießen dan anggota Pusat Media dan Interaktivitas di sana.

Alamat : Universitas Gießen, Institut Ilmu Politik, Karl-Glöckner-Str. 21 E, 35294 Gießen. E-Mail : christoph.bieber@sowi.uni-giessen.de

Publikasi tentang tema-tema internet dan politik, terakhir: Ein Hauch von Napster. “Vote-Swapping” dalam kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2000, dalam: Th. Harth/R. Meier-Walser (pen.), Dunia Politik di Internet. Peluang baru untuk berpartisipasi secara demokratis dengan Internet?, München 2001

Edisi berikutnya

Reiner Münz

Geregelte Zuwanderung: eine Zukunftsfrage für Deutschland (Pengaturan Imigrasi: Masalah Jerman di Masa Depan)

Josef Schmid

Bevölkerungsentwicklung und Migration in Deutschland (Perkembangan Penduduk dan Migrasi di Jerman)

Kay Hailbronner

Grundprinzipien des neuen Zuwanderungsgesetzes (Prinsip-Prinsip Dasar Undang-Undang Baru tentang Imigrasi)

Manfred Wöhlcke

Grenzüberschreitende Migration als Gegenstand internationaler Politik (Migrasi sebagai Objek Politik Internasional)

Tanjev Schultz/Rosemarie Sackmann

“Wir Türken”. Zur kollektiven Identität türkischer Migranten in Deutschland (“Kami orang-orang Turki Tentang Identitas kolektif emigran Turki di Jerman).

Jürgen Krönig *Essay*

Jihad versus Mcworld

Dari Politik dan Sejarah Kontemporer, B 41-42/2001, h. 3-5

■ Motif teror yang dilakukan di New York dan Washington bukan hanya didasari pertentangan politik dengan Amerika Serikat, tapi teror itu juga merupakan pertanda dramatis dari sebuah konflik baru yang bertitiktolak pada pandangan fundamentalis. Dalam kenyataannya teror itu menyangkut seluruh negara barat, peradaban barat. Tapi bukan berarti perlawanan menentang terorisme dilakukan hanya dengan memperhatikan aspek keamanan. Harus ditemukan suatu keseimbangan secara global antara keinginan untuk mempertahankan identitas masing-masing budaya dengan nilai-nilainya dan keterbukaan terhadap budaya lain, termasuk pihak-pihak yang dianggap asing.

Thomas Leif

Kekuasaan tanpa Tanggungjawab

Pengaruh Liar Media dan Hilangnya Minat Masyarakat

Dari Politik dan Sejarah Kontemporer, B41-42/2001, h. 6-9

■ Di tahun-tahun belakangan ini istilah “demokrasi media” telah sering dibicarakan dalam diskusi politik. Pengaruh media terhadap politik meningkat dengan pesat. Tidak jarang para politisi menyesuaikan konsep dan posisi mereka dengan pengaruh media yang diharapkan. Perekayasa politik dan tendensi personalisasi politik semakin menggeser isi (substansi) politik. Pengaruh media ini sangat bertentangan dengan hilangnya minat masyarakat (desinteresse) dan pelaku-pelaku politik terhadap perkembangan ini. Mengingat adanya penyampaian informasi yang sifatnya “menggampangkan” padahal di saat yang sama pengaruh format-format

hiburan semakin bertambah, maka perlu diadakan diskusi secara meluas tentang tren media.

Otfried Jarren

“Serikat Media” – Risiko terhadap Komunikasi Politik

Dari Politik dan Sejarah Kontemporer, B 41-42/2001, h. 10-19

■ Tulisan ini mengetengahkan proses terbentuknya “serikat media”. Media-media yang baru muncul sangat mementingkan faktor ekonomi. Ini mempertajam situasi bagi para pelaku politik. Dampak dari orientasi ekonomi itu misalnya meningkatnya pengeluaran nara sumber untuk komunikasi. Akibat selanjutnya adalah munculnya persaingan politik (persamaan kesempatan). Dalam tulisan ini dibuat secara garis besar poin-poin inti dari konsep regulasi. Untuk mengamankan komunikasi politik dibutuhkan partisipasi pelaku (tokoh) masyarakat, tentunya di samping politisi yang aktif di pemerintah. Profesionalitas media harus ditingkatkan melalui bentuk-bentuk “pengaturan regulasi sendiri” (regulierte Selbstregulierung).

Christina Holtz-Bach

Masalah Pribadi dalam Politik: Tren Baru Media?

Dari Politik dan Sejarah Kontemporer, B41-42/2001, h. 20-26

■ Berbeda dengan situasi di Amerika Serikat dan Inggris Raya, sampai saat ini media Jerman tetap menganggap tabu memberitakan masalah pribadi politisi. Akan tetapi, konsep tabu ini kelihatannya akan segera hilang: Kehidupan pribadi politisi semakin sering saja dijadikan tema oleh media. Faktor yang menyebabkan munculnya perkembangan ini adalah adanya proses saling mengambil untung antara politik dan media. Artinya, politisi memanfaatkan masalah pribadi untuk mempresentasikan diri mereka. Ini tentu saja sesuai dengan kepentingan sistem media yang telah dikomersialkan. Sistem ini menilai politik atas dasar kriteria hiburan. Dengan kata lain, penyajian politik harus bersifat menghibur. Dengan begitu pemirsa pun dapat digiring.

Barbara Pfetsch

“Amerikanisasi” Komunikasi Politik?

Politik dan Media di Jerman dan Amerika Serikat

Dari Politik dan Sejarah Kontemporer, B 41-42/2001, h. 27-36

■ Komunikasi politik di Jerman dan Amerika Serikat lebih cenderung menunjukkan perbedaan daripada persamaan karena adanya perbedaan dalam proses politik dan sistem mediana. Di Amerika Serikat ciri khas budaya komunikasi politiknya adalah adanya orientasi media pada pentingnya penekanan faktor jarak yang dibuat secara profesional. Sementara orientasi tindakan para pelaku komunikasi politik di Jerman ditentukan oleh model yang dibuat oleh partai politik dan berdasarkan pada konsensus. Namun sejak pertengahan tahun 90-an ada indikasi terhadap proses perubahan di Jerman. Mulai saat itu para jurnalis cenderung tidak lagi mengedepankan aspek-aspek struktural dari proses politik, sementara orientasi pada faktor profesionalitas yang terpusat pada media semakin mendapatkan tempat.

Claus Leggewie/Christoph Bieber
Demokrasi Interaktif

Komunikasi Politik melalui Online dan Proses- Proses Politik Digital
Dari Politik dan Sejarah Kontemporer, B 41-42/2001, h. 37-45

■ “Politik di internet” yang tadinya hanya angan-angan belaka telah berubah menjadi kegiatan rutin yang hampir tidak bisa diabaikan oleh pelaku politik atau politisi dan masyarakat sipil. Tulisan ini menggambarkan penopang dan format-format penting dari komunikasi online. Berdiri paling depan adalah partai-partai politik. Program internet mereka seperti Pusat partai virtual, jaringan fungsionaris dan anggota, perkumpulan lokal virtual dan kampanye melalui online membentuk spektrum komunikasi partai secara digital. Selanjutnya dengan E-Voting, partisipasi warga lewat internet dan diskursus internet dibahas pula proses-proses politik pilihan yang dapat mendorong terjadinya modernisasi sistem-sistem demokrasi.